



Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 s.d 2014)

Marhawai¹

¹Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Corresponding Author: **marhawai-68@gmail.com** ^{*2}

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the legislative measure, the prosperity of the local government, the size of the local authority and intergovernmental revenue on the financial performance of local governments. This study is hypothesis testing with secondary data sources and being analyzed using path analysis. The population in this study are all districts / cities in Aceh government, amounting to 23 districts / cities with a span of years 2010 until 2014. The results showed that (1) the size of the legislature, the prosperity of the local government, the size of local government and intergovernmental revenue collectively the same effect on the financial performance of local government, (2) partially, the size of the legislature and the size of local government negatively affect the financial performance of local governments, (3) partially prosperity of local governments and intergovernmental revenue positive effect on the financial performance of local governments.

KEYWORDS : *The size of the legislature, the prosperity of the local government, the size of local government, intergovernmental revenue and financial performance of local governments*

1. Pendahuluan

Era otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian diganti menjadi UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 pasal 183 ayat (2) tentang Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh mendapatkan dana otonomi khusus setara 2% (dua persen) pagu DAU nasional untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya setara 1% (satu persen) dari pagu DAU nasional untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada daerah otonom yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektivitas otonomi daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari belanja pegawai di tingkat kabupaten/kota di Aceh terus meningkat sejak tahun 2010 (Sumber data BPK-RI). Pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh alokasi pegawai. Dua puluh tiga daerah kabupaten/kota di Aceh, pada tahun 2012, total belanja pegawai dari seluruh daerah di Aceh tercatat sebesar Rp. 8,4 triliun atau sekitar 9% dari PDRB Aceh. Data tersebut

menunjukkan bahwa masih buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Aceh.

Pada tahun 2014 Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), menilai realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2014 sangat jauh dari target. Bahkan hingga bulan November tahun 2014, realisasi keuangan baru terserap 58,4 % dan realisasi fisik 64%, ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Aceh tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan literatur ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya faktor ukuran legislatif & *lverage* (Giligan & Matsuka (2001), Kusumawardani (2012), & Anzarsari (2014), kemakmuran pemerintah daerah (Sumarjo (2010) & Surepno (2013), ukuran pemerintah daerah & *intergovernmental revenue* (Patrick (2007) & Simanullang (2013), *Return on Equity* (ROE) (Surepno, 2013), pendapatan pajak daerah (Sesotyanyingtyas, 2012).

Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu faktor yang diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran legislatif. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, & Brown (2010).

Faktor kedua yang diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan adalah kemakmuran pemerintah daerah. Abdullah (2004) menyatakan bahwa kemakmuran dari pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD. PAD merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bukti peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Adi, 2006).

Faktor ketiga yang diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran pemerintah daerah. Untuk memberikan pelayanan

yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula sehingga dapat memberikan kemudahan dalam memberi pelayanan masyarakat guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Kusumawardani, 2012).

Faktor selanjutnya yang diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan adalah *Intergovernmental revenue*. *Intergovernmental revenue* diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat berharap semakin besar *intergovernmental revenue* maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

Rumusan Masalah

Apakah ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota pada Provinsi Aceh baik secara simultan maupun parsial.

Tujuan

Untuk menguji pengaruh ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota pada Provinsi Aceh baik secara simultan maupun parsial.

2. Kajian Pustaka

Teori Agensi

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni

antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan. Hubungan keagenan lebih sering dibahas dalam konteks manajemen perusahaan yang berorientasi bisnis.

Teori keagenan ini banyak memberikan dampak negatif yang berupa perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*). Hal ini terjadi tidak lepas dari kaitannya dengan masalah asimetri informasi. Pihak agen memiliki informasi keuangan yang lebih banyak dari pada pihak prinsipal. Di sisi lain, pihak prinsipal dapat menggunakan kewenangannya/kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan pribadi (*self-interest*) (Abdullah dan Asmara, 2006).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan menurut PP nomor 71 tahun 2010 merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2005).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008: 230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008: 231-232).

Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah (Abdullah dan Asmara, 2006). Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar

pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah, 2008).

Salah satu indikator efisiensi pengawasan terhadap pemerintah daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran legislatif. Pengukuran variabel ukuran legislatif menggunakan jumlah total anggota DPRD (Gilligan dan Matsusaka, 2001).

Kemakmuran Pemerintah Daerah

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemampuan untuk mencukupi kebutuhan diukur dari besaran Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD (PP 24/ 2004). PAD merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Membiayai kebutuhan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan PAD agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Abdullah, 2004).

Pengukuran variabel kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD (Abdullah, 2004), karena meskipun kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% -16%), PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto et al., 2010).

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur ukuran perusahaan (Nasser, 2009). Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut. Organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan

daripada organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas 2011).

Pemerintah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan (Ettredge, et. al (2002), Pirchegger dan Wagenhofer (1999) dalam Laswad et. al, 2005).

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Kementerian Dalam Negeri, kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis studi kausalitas (*causal study*). Waktu yang digunakan

dalam pengumpulan data adalah *cross-sectional studies* dengan unit analisis organisasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di pemerintahan Aceh dengan rentang waktu 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2010 s.d 2013. Dengan demikian jumlah amatan yang diteliti berjumlah 23 Kabupaten/Kota per tahunnya atau dengan total 115 kabupaten/kota selama 4 (lima) tahun.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dengan teknik pengumpulan data melalui metode dokumenter.

Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen (Y), dan variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 (terlampir).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah *standarized multiple regression (path analysis)* yang menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di pemerintah Aceh tahun 2010 s.d tahun 2014.

Rancangan pengujian hipotesis dapat dilihat pada Gambar 1 (terlampir), dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = \rho_{YX_1}X_1 + \rho_{YX_2}X_2 + \rho_{YX_3}X_3 + \rho_{YX_4}X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X_1 = Ukuran Legislatif

X_2 = Kemakmuran Pemda

X_3 = Ukuran Pemda

X_4 = *Intergovernmental Revenue*

ρ_{YX} (i = 1,2,3,4) = Koefisien jalur

ε = Error term

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil deskriptif nilai rata-rata variabel kinerja keuangan pemda adalah 0,97534. Nilai rata-rata sebesar 0,97534 berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh tergolong memiliki kinerja yang kurang baik karena kurang efisien. Sebagaimana telah dijelaskan di metode penelitian apabila pemerintah daerah yang memiliki persentase efisiensi sebesar 90-100 maka pemerintah daerah tersebut kurang efisien. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika memiliki persentase sebesar 60-80. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh belum membelanjakan dana yang ada sesuai yang dianggarkan serta masih buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan pekerjaan, pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh belum dapat mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Berdasarkan populasi yang ada maka didapatkan bahwa hampir rata-rata pemda kabupaten/kota di Aceh memiliki kinerja yang kurang efisien, dengan nilai standar deviasi variabel kinerja keuangan adalah sebesar 0,03945.

Nilai maksimum variabel kinerja keuangan pemda atau efisiensi terendah sebesar 1,10773 dalam penelitian ini diperoleh Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2010. Efisiensi sebesar 1,10773 atau 110,773 % mengindikasikan bahwa pemda kabupaten Aceh Timur belum bijak dalam melakukan pengeluaran daerah untuk membelanjakan dana yang ada dan masih buruknya tingkat pelayanan publik.

Nilai minimum variabel kinerja keuangan pemda atau efisiensi tertinggi adalah sebesar 0,82939 dalam penelitian diperoleh Kabupaten Simeulue pada tahun 2011. Efisiensi sebesar 0,82939 atau 82,94 % mengindikasikan bahwa

persentase tersebut menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue masih tergolong pada katagori kurang efisien, namun sudah mampu untuk mengalokasikan anggaran yang ada untuk digunakan semestinya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program *SPSS (Statistical Package for Social Sciences)*, hasil analisis jalur pengaruh ukuran legislatif (X_1), kemakmuran pemerintah daerah (X_2), ukuran pemerintah daerah (X_3), dan pembayaran utang pemerintah (X_4) terhadap kinerja keuangan (Y) untuk 23 kabupaten/ kota pemerintah Aceh selama 5 tahun (2010 s.d 2014) dapat dilihat pada Gambar 2 (terlampir).

Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Intergovernmental Revenue* secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan Nilai ρ_{YX} dari keempat variabel independen, yaitu ukuran legislatif, kemakmuran pemda, ukuran pemda, dan *intergovernmental revenue* bahwa semua $\rho_{YX_i} \neq 0$, dimana $\rho_{YX_1} = -0,051$, $\rho_{YX_2} = 0,052$, $\rho_{YX_3} = -0,112$, dan $\rho_{YX_4} = 0,011$. Seperti diketahui bahwa syarat untuk menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen apabila sedikit atau sekurang-kurangnya ada satu $\rho_{YX_i} \neq 0$. Berdasarkan syarat tersebut, hasil penelitian ini menolak H_0 (hipotesis nol) dan menerima H_a (hipotesis alternatif). Sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan

intergovernmental revenue secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,015 menunjukkan bahwa ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 1,5%, sedangkan sisanya sebesar 98,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (ε).

Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,051. Nilai koefisien jalur pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tidak sama dengan nol ($\rho_{YX_1} \neq 0$). Mengacu pada syarat tersebut, maka hasil penelitian ini menolak H_0 (hipotesis nol) atau tidak menolak H_a (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk mengetahui besarnya (kuat-lemahnya) pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasinya ($\rho_{YX_1}^2$), yaitu sebesar: $(-0,051)^2 \times 100\% = 0,2601\%$ Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,2601%.

Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai koefisien jalur sebesar 0,052 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh kemakmuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak sama dengan nol ($\rho_{YX_2} \neq 0$). Mengacu pada syarat tersebut, maka hasil penelitian ini menolak H_0 (hipotesis

nol) atau tidak menolak H_a (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Untuk mengetahui besarnya (kuat-lemahnya) pengaruh kemakmuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasinya ($\rho_{YX_2}^2$), yaitu sebesar: $(0,052)^2 \times 100\% = 0,2704\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,2704%.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai koefisien jalur sebesar -0,112 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak sama dengan nol ($\rho_{YX_3} \neq 0$). Mengacu pada syarat tersebut, maka hasil penelitian ini menolak H_0 (hipotesis nol) atau tidak menolak H_a (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk mengetahui besarnya (kuat-lemahnya) pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasinya ($\rho_{YX_3}^2$), yaitu sebesar: $(-0,112)^2 \times 100\% = 1,2544\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,2544%.

Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai koefisien jalur sebesar 0,011 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak sama dengan nol ($\rho_{YX_4} \neq 0$). Mengacu pada syarat tersebut,

maka hasil penelitian ini menolak H_0 (hipotesis nol) atau tidak menolak H_a (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk mengetahui besarnya (kuat-lemahnya) pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasinya ($\rho_{YX_4}^2$), yaitu sebesar: $(0,011)^2 \times 100\% = 0,0121\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,0121%.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien determinasi sebesar 0,015 menunjukkan bahwa ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,5%, sedangkan sisanya sebesar 98,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini ($\varepsilon = 1 - R^2$).

Mengacu kepada klasifikasi Sarwono (2007:35), maka pengaruh sebesar 1,5% tersebut menunjukkan bahwa ukuran legislatif, kemakmuran pemda, ukuran pemda, dan *intergovernmental revenue* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang cukup terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di pemerintah Aceh.

Pengaruh Ukuran legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah dengan ditandai oleh nilai koefisien jalur sebesar -0,051 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,2601%. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,2601% menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,2601%.

Pengaruh sebesar 0,2601% variabel ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah mampu dijelaskan oleh ukuran legislatif sebesar 0,2601%. Mengacu kepada klasifikasi sarwono (2007:35), maka pengaruh sebesar 0,2601% tersebut menunjukkan bahwa ukuran legislatif secara parsial memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di pemerintah Aceh.

Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan ditandai oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,052 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,2704%. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,2704% menunjukkan bahwa kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,2704%.

Pengaruh sebesar 0,2704% kemakmuran pemda terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah mampu dijelaskan oleh kemakmuran pemda sebesar 0,2704%. Mengacu kepada klasifikasi sarwono (2007:35), maka pengaruh sebesar 0,2704% tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran pemda secara parsial memiliki pengaruh positif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di pemerintah Aceh.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan ditandai oleh nilai koefisien jalur sebesar -0,112 dan nilai koefisien determinasi sebesar 1,2544%. Nilai koefisien determinasi sebesar 1,2544% menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,2544%.

Pengaruh sebesar 1,2544% variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah mampu dijelaskan oleh variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 1,2544%. Mengacu kepada klasifikasi sarwono (2007:35), maka pengaruh sebesar 1,2544% tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di pemerintah Aceh.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang ditandai oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,011 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,0121%. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,0121% menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,0121%.

Pengaruh sebesar 0,0121% variabel *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah mampu dijelaskan oleh *intergovernmental revenue* sebesar 0,0121%.. Mengacu kepada klasifikasi

sarwono (2007:35), maka pengaruh sebesar 0,0121%. tersebut menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* secara parsial memiliki pengaruh positif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di pemerintah Aceh.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* secara bersama-sama atau juga secara simultan dapat dikatakan bahwa memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Ukuran legislatif secara parsial juga memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya bahwa semakin tinggi ukuran legislatif juga berarti semakin rendah kinerja keuangan.
3. Kemakmuran pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh positif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya bahwa semakin besar tingkat kemakmuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
4. Ukuran pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah juga berarti semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. *Intergovernmental revenue* secara parsial memiliki pengaruh positif yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya bahwa semakin tinggi *intergovernmental revenue* juga berarti semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah tersebut.

Saran

Disarankan pada pihak pengguna laporan keuangan pemerintah terutama Pemerintah Aceh sendiri agar dapat lebih meningkatkan kinerja

keuangannya. Artinya pemerintah diharapkan untuk mengkaji ulang jajaran legislatifnya untuk meningkatkan kinerja keuangan serta mampu untuk mengalokasikan dana *intergovernmental revenue* dari pemerintah pusat agar dapat menghasilkan PAD yang lebih tinggi dan mampu membelanjakan dana transfer tersebut dengan bijak untuk pengadaan aset yang berguna bagi kemakmuran masyarakat sehingga dengan meningkatnya ukuran pemerintah semakin meningkatkan pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan juga bagi penelitian selanjutnya untuk menguji variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan variabel lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berhubung variabel yang diangkat dalam penelitian ini hanya menjelaskan 1,5 % pengaruhnya terhadap kinerja keuangan sedangkan masih terdapat 98,5% variabel lainnya yang dapat menjelaskan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2004). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: pendekatan *principal-agent theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Abdullah, S & Asmara, J.A. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: bukti empiris atas aplikasi *agency theory* di sektor publik. *Symposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Aceh Post. [Http://www.acehpost.com/national/2400-MaTa-realisisi-APBA,-Tahun-2014-masih-buruk.html](http://www.acehpost.com/national/2400-MaTa-realisisi-APBA,-Tahun-2014-masih-buruk.html) (Diakses 22 Januari 2016).
- Adi, Priyo Hari. 2006, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. *Procedding Symposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Anonimous. (2016). "Melimpahnya dana otsus, Aceh masih menjadi daerah termiskin di Indonesia". *Tempo.com*. (diakses 11-1-2016)
- Anzarsari, D. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada kabupaten/kota se-

- Jawa Tengah). *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Giligan, T. W & Matsusaka, J. G. (2001). Fiscal policy, legislature size, and political parties: evidence from state and local governments in the first half of the 20th century. *National Tax journal*, 54, 57-82.
- Halachmi, A. (2005). *Performance measurement is only one way of managing performance*. *international journal of productivity and performance management*, 54, 502-516.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A & Abdullah, S. (2006). "Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1), 53-64.
- Hamzah, A. (2008). Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal SNA XI*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Kusumawardani, M. (2012). 'Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia'. *AAJ*, 1 (1), 60-66.
- Laswad, F, Fisher, R, and Oyelere, P, (2005). Determinents of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Pubic Policy*, 24(2), 385-311.
- Nasser, E. M & Parulian, T, (2009), "Pengaruh Faktor-faktor Internal Perusahaan Terhadap Income Smoothing", *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, 6 (1), 75-100.
- Patrick, P. A. (2007). *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Qanun No.1 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Keuangan Aceh*.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa). *Accounting Analysis Journal*, 1(1). Universitas Negeri Semarang.
- Simanullang, Gideon. (2013). Pengaruh belanja modal, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Umrah Journal Of Accounting 1 (1)*, 1-22.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., & Brown, A. (2010). Mandatory disclosure compliance and local government characteristics : Eviddence from Indonesian municipalities. *Journal Public policy*.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *skripsi*. surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- Supardi. (2011). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Jakarta: Ufuk Publishing House.
- Surepno. (2013). Pengaruh *return on equity (roe)*, ukuran (*size*) dan kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Undang – Undang No. 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintah Aceh*.